



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR: 188.4/ 22 / XII /DPRD/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** : a. bahwa agar dalam pembentukan Rancangan Peraturan daerah dapat dilaksanakan secara terarah terpadu, efisien, efektif dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka perlu perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah Dewan;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Mamuju Tahun 2026;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Mamuju Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Mamuju Nomor: B/100.3.2./184/2025 Tanggal 18 Desember 2025 tentang Surat Pengusulan Propemperda Tahun 2026;
2. Rapat Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tanggal 23 Desember 2025 Membahas tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tanggal 29 Desember 2025 tentang Penetapan Propemperda Kabupaten Mamuju Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026**

- KESATU : Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026 sebanyak 7 Usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju dan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026;

- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, dalam hal:
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. Keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani Bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan Bagian Hukum
- KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 29 Desember 2025

KETUA

H. SYAMSUDDIN HATTA, SE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
 2. Bupati Mamuju di Mamuju
 3. Kepala BAPPERIDA Kab. Mamuju di Mamuju
 4. Kepala BPKAD Kab. Mamuju di Mamuju
 5. Kabag Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju
- Pertinggal

USULAN EKSEKUTIF

Lampiran : Keputusan Propempera Kabupaten Mamuju Tahun 2025
: Nomor 188.4/ 22 /XII/DPRD/2025
: Tanggal 29 Desember 2025

NO	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN / DASAR HUKUM	UNIT INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	LAMA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PERDA	Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1. Perlindungan 2. Pemanfaatan 3. Pengendalian 4. Pengawasan 5. Pembiayaan 6. Peran Serta Masyarakat	BARU		1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Intesif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Mamuju (Tahap Perencanaan)	2026

					1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah bbrpkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 2. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Tahap Harmonisasi)	2026
2.	PERDA	Badan Permusyawaratan Desa		LAMA			
		1. Alokasi Jumlah Anggota BPD di Desa 2. Kelembagaan, Fungsi & Tugas BPD 3. Hak, Kewajiban & Kewenangan BPD 4. Peraturan Tata Tertib BPD 5. Pembinaan dan Pengawasan					
3.	PERDA	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju (RTRW) 2025-2045		LAMA		Dinas Pekerjaan Umum (tahap Penyusunan)	2026
		1. Pokok Materi, Tujuan, Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah. 2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah. 3. Rencana Pola Ruang Wilayah daerah 4. Kawasan Strategis Wilayah daerah 5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 7. Kelembagaan 8. Hak, Kewajiban dan peran Masyarakat dalam penataan Ruang					

				Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 4. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang		
				1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbgmn telah bbrp kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pasal 26 Bupati Menetapkan Perda tentang Penyerahan Sarana, Utilitas Perumahan & pemukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan Kab. Mamuju (Tahap Pembahasan)	2026
4.	PERDA Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	1. Wewenang 2. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 3. Persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum 4. Tim Verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum 5. tahapan dan tata Cara penyerahan Prasarana, Sarana & utilitas Umum 6. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah 7. Pengawasan & pengendalian dalam Penyediaan & penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum	LAMA			

				1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbgmn telah bbrp kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju (Tahap Pembahasan)	2026
5.	PERDA Tata Cara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1. Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 2. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan 3. Pemantauan Pengendalian dan Pelaporan	LAMA	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbgmn telah bbrp kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mamuju (Tahap Pembahasan)	2026
6	PERDA Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah 2. Hak dan kewajiban 3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 5. Kerja Sama 6. Intensif dan Disinsentif 7. Kelenbagaan 8. Peran serta Masyarakat 9. Pembinaan dan Pengawasan 10. Pembiayaan 11. Perizinan Berusaha 12. Larangan		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbgmn telah bbrp kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju (Tahap Harmonisasi)	2026

				1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sbgmn sebagaimana telah bbrp kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).		
7	PERDA	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pajak Daerah 2. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati 3. Pajak yang dipungut berdasarkan Penghitungan sendiri Wajib Pajak 4. Masa Pajak dan Tahun Pajak 5. Retribusi Daerah 6. Retribusi Jasa Umum 7. Retribusi Jasa Usaha 8. Retribusi Perizinan tertentu 9. Pemungutan Pajak dan Retribusi 10. Pemberian Keringanan, Pengurangan Pembebasan dan Sanksi 11. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi 12. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi 13. Kerahasiaan Data Wajib Pajak	UBAH		Badan Pendapatan Daerah Kab. Mamuju 2026

Mamuju, 29 Desember 2025

